

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, sedangkan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Maka dari itu untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan pembangunan di semua bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sesuai dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini, pemerintah lebih menitikberatkan pada bidang pembangunan ekonomi, karena bidang ekonomi merupakan hal yang sangat vital untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan ekonomi di arahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk memajukan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras adil dan merata. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong lajunya pembangunan adalah dengan mendirikan badan-badan atau lembaga-lembaga pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pembiayaan pembangunan berasal dari sumber antara lain dari kredit yang disalurkan baik oleh pemerintah maupun swasta.<sup>1</sup>

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun di lihat dari istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan pandangan dari istilah bahasa inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar.<sup>2</sup> Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Disebut sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternative karena Bank yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang di butuhkan oleh masyarakat. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini di sebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Baddrul Zaman, “ *Perjanjian Kredit Bank*”, Alumni, Bandung 1989, hal 5

<sup>2</sup> Sunaryo, “ *Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 1

bank, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang perlu di pertimbangkan.

Perusahaan Multifinance merupakan salah satu wadah yang sedang populer dalam perkembangan perusahaan saat ini. Ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar multifinance ini. Salah satunya adalah sewa guna usaha atau kerap kali disebut dengan Leasing. Leasing saat ini merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh asset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan Leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada. Selain itu ada produk multifinance lain yang dinamakan dengan anjak piutang. Anjak piutang ini merupakan salah satu instrument yang dewasa ini sering disebut dengan *factoring* dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan *factoring*, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan *factoring* (factor). Disamping itu, instrument lainnya yang sedang marak-maraknya adalah *consumer financing* atau pembiayaan konsumen dimana dalam hal ini ada perusahaan yang bertindak sebagai penjamin dalam pemberian kredit kepada konsumen yang tidak menjadi satu kesatuan dalam perbankan melainkan perusahaan ini berdiri

sendiri<sup>3</sup>. Pembiayaan konsumen ini adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, bahwa Pengertian Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Bidang usaha lembaga pembiayaan ini meliputi: sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan lain-lain. Lembaga pembiayaan ini lebih dititik-beratkan pada sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan meliputi :

- a. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
- b. Perusahaan Modal Ventura; adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui

---

<sup>3</sup> *Ibid* Sunaryo, Hal 12

pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur

Sedangkan di dalam pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyebutkan

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :

- a. Sewa Guna Usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
- b. Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut
- c. Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit
- d. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran

Lembaga pembiayaan di katakan sebagai sumber pembiayaan alternative karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar

modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian dalam kenyataan tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dan guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

Begitu pun juga dengan PT BFI Finance Indonesia, Tbk. (BFI) yang didirikan pada tahun 1982 sebagai perusahaan patungan dengan *Manufacturer Hanover Leasing Corporation* (MHLC), Amerika Serikat. BFI juga berperan sebagai lembaga pembiayaan untuk memberikan permodalan bagi masyarakat, kemudian pada tahun 1990, BFI mendapatkan izin sebagai perusahaan Multi Finance, dari sebelumnya hanya sebagai perusahaan *leasing*; kemudian berganti nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia. BFI

mulai melebarkan sayap di bidang *leasing* (sewa guna usaha), *consumer financing* (pembiayaan konsumen)<sup>4</sup>

Produk-Produk di PT BFI Finance Indonesia, Tbk, adalah sebagai berikut :

#### 1. **DE (Dana Exspress)**

Adalah Pembiayaan konsumen yang bergerak di dalam pemberian kredit dalam bentuk dana untuk memenuhi kebutuhan atas pengadaan barang yang di inginkan oleh konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran, di mana Konsumen yang membutuhkan pinjaman dana diwajibkan untuk menyerahkan BPKB Mobil sebagai jaminan..

#### 2. **KCM (Kredit Cicilan Mobil)**

Adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang khususnya Mobil, untuk kepentingan konsumen. Di mana konsumen diwajibkan untuk membayar angsuran atau cicilan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Setelah melaksanakan restrukturisasi keuangan antara tahun 1998 hingga 2000 sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di Asia termasuk Indonesia. BFI menyelesaikan proses restrukturisasi keuangan tersebut pada tahun 2001, dan mendapat dukungan yang besar dari para pemegang saham baru. Sebagai dampaknya BFI tumbuh menjadi perusahaan dengan neraca yang sehat dan bersih, didukung oleh para profesional yang mempunyai kemampuan di bidangnya, dan memiliki jaringan bisnis yang luas dalam mengejar peluang bisnis baru di Indonesia. Lebih lanjut, bisnis BFI beralih ke

---

<sup>4</sup> [www.BFIFINANCE.com](http://www.BFIFINANCE.com), Sabtu 24 Juli 2010. Jam 11.00 WIB

pembiayaan mobil bekas baik untuk produktif maupun komersial, terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun wirausaha. Strategi tersebut dinilai berhasil, terbukti dengan peningkatan pertumbuhan perusahaan, performa keuangan yang sehat dan kualitas kredit yang baik.

Per Maret 2008, BFI memiliki lebih dari 60 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 1,300 karyawannya, BFI mampu mendapatkan dan memproses aplikasi serta menagih piutang secara efisien dan terbukti dengan beberapa penghargaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI”) adalah perusahaan pembiayaan, yang menawarkan kepada para pelanggannya berbagai rangkaian produk jasa keuangan dalam bentuk sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen dengan jangkauan pelayanan hampir disebagian besar propinsi di Indonesia. Untuk dapat memenuhi peran tersebut BFI senantiasa memelihara kepercayaan dengan para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan stakeholder lainnya secara profesional dan berintegritas serta bertindak dengan penuh kehati-hatian. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan tingkat perilaku yang dapat diterima semua pihak. Prinsip-prinsip berusaha yang tercantum dalam pedoman ini menetapkan standar perilaku tersebut.

Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha ini berlaku bagi seluruh kegiatan BFI baik di pusat maupun dikantor-kantor cabang, serta bagi setiap karyawannya. Semua pihak yang berwenang didalam BFI mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dikomunikasikan secara lengkap kepada karyawannya untuk ditaati dengan sungguh-sungguh. terkait dengan pencapaian tersebut.



Produk-Produk di PT BFI Finance Indonesia yang banyak di minati konsumen adalah dana expres yang merupakan Pembiayaan konsumen yang bergerak di dalam pemberian kredit dalam bentuk dana untuk memenuhi kebutuhan atas pengadaan barang yang di inginkan oleh konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran, di mana Konsumen yang membutuhkan pinjaman dana diwajibkan untuk menyerahkan BPKB Mobil sebagai jaminan. Produk dana expres ini sangat membantu bagi konsumen karena dengan syarat-syarat yang mudah dana yang di berikan dapat langsung di terima oleh konsumen dalam waktu satu (1) hari apabila prosedur dan syarat-syarat di penuhi oleh konsumen. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BFI FINANCE CABANG SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN**”

## **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Express di BFI Finance cabang Surakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2009, maka penulis mengambil obyek penelitian penulisan skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DI BFI FINANCE CABANG SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN**

### **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan arah penulis untuk melaksanakan penelitian dilapangan serta mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan perumusan masalah tersebut yang meliputi:

1. Bagaimanakan Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Express di BFI Finance Cabang Surakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ?
2. Akibat Hukum Apa Sajakah Bila Konsumen Mengalami Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Pembiayaan Dana Express di BFI Finance Cabang Surakarta ?
3. Hambatan-Hambatan Apa Sajakah Yang Di Hadapi BFI Finance Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Dana Express ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana express di BFI Finance cabang Surakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
2. Untuk mengetahui Akibat hukum apa saja bila konsumen mengalami wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan dana express di BFI Finance Cabang Surakarta
3. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi BFI Finance dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen bentuk dana express

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya dibidang Lembaga Keuangan Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dalam bentuk dana express di BFI Finance cabang Surakarta
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh .

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan atas suatu kajian aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>5</sup>.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam *deskriptif analisis*, bersifat *deskriptif* karena *penelitian* ini di maksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan konsumen dalam bentuk dana express di BFI Finance cabang Surakarta, analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam Pelaksanaan pembiayaan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hilman Hadi Kusuma , *Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum* , Bandung : Mandar Madju , 1995 , Hal. 61

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1986. Hal 10

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

#### a. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu Staf di BFI Finance Cabang Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu

#### 1. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan yang ada sebelumnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu salah satu Staf di BFI Finance Cabang Surakarta.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang di peroleh dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini di lakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, kemudian di cari pemecahanya dengan cara menganalisa dan pada akhirnya akan di tentukan kesimpulan.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Asas-asas Perjanjian

3. Macam-Macam Perjanjian
  4. Syarat Syahnya Perjanjian
  5. Perjanjian Jual Beli
  6. Wanprestasi
- B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia
1. Pengertian Hukum Jaminan
  2. Bentuk-Bentuk Jaminan
  3. Pengertian Fidusia Dan Perjanjian Fidusia
    - a. Pengertian Fidusia
    - b. Para Pihak Dalam Fidusia
    - c. Pendaftaran Fidusia
    - d. Bentuk-Bentuk Fidusia
- C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan
  2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan
  3. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan
  4. Pengertian Pembiayaan Konsumen
  5. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
  6. Aspek Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Express
- BFI Finance Cabang Surakarta Berdasarkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga  
Pembiayaan.

B. Akibat Hukum Bila Konsumen Mengalami Wanprestasi Di Dalam  
Perjanjian Pembiayaan Dana Express di BFI Finance Cabang  
Surakarta.

C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi BFI Finance Dalam  
Pelaksanaan Pembiayaan Konsumen Dana Express

#### BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN